

BAB III

KEADAAN INTERNAL KOLOMBIA DAN HUBUNGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT

III.1 Sejarah Kolombia: *Drugs*, Kekerasan dan Demokrasi

Kolombia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi tertua dan yang paling stabil di wilayah Amerika Latin. Sejak tahun 1910, Kolombia menjadi Negara demokrasi pluralis dan memiliki banyak partai (multipartai). Namun, pada tahun 1953-1957, Kolombia tidak menjadi Negara yang multipartai karena pemerintahan diktator yang dipimpin oleh Gustavo Rojas Pinilla.

Kolombia memasuki masa terburuk, dengan tingkat kekerasan yang sangat tinggi pasca Perang Dunia II, yang diawali oleh pembunuhan Jorge Eliecer Gaitan, pemimpin Partai Liberal, pada April 1948. Pembunuhan tersebut memicu pemberontakan rakyat sipil, kericuhan dan *political struggles* antara kedua pemimpin Partai Liberal dan Partai Konservatif. Konfrontasi antar pengikut kedua partai semakin besar dan berubah menjadi *civil war* yang memakan banyak korban. Kericuhan yang muncul antar dua partai besar tersebut dikenal sebagai *La Violencia*.

Civil war di Kolombia berakhir pada masa Pemerintahan Jenderal Rojas Pinilla, seorang diktator, tahun 1953-1957. Rezim pimpinan Pinilla kemudian jatuh pada tahun 1958. Pasca kejatuhan Pinilla, dibentuklah

kesepakatan *National Front* menjadi awal dimulainya pemerintahan baru pasca *civil war* di Kolombia. *National Front* merupakan kesepakatan 16-Tahun yang dibentuk untuk membatasi dan membagi dua kekuasaan yang menjadi perebutan antara Partai Liberal dan Konservatif. Akhirnya pada tahun 1958, kedua partai tersebut memutuskan untuk membagi dua kekuasaan di dalam pemerintahannya. Dalam perjalanannya, *National Front* bukan merupakan solusi yang mampu menciptakan Kolombia yang lebih stabil dan lebih aman.

Demokrasi di Kolombia dimulai dengan Konstitusi tahun 1991 untuk memperbaiki perekonomian, sektor sosio-kultural, lingkungan dan menangani masalah *Human Rights*. Kolombia kemudian membentuk 32 departemen dalam pemerintahannya. Ada enam partai politik yang diakui dalam pemerintahannya, namun tidak semuanya memiliki perwakilan legislatif. Empat partai besar diantaranya adalah Partai Liberal, Partai Konservatif, *Patriotic Union* (dibentuk oleh FARC dan Partai Komunis), serta *Movement-19* (M-19, terbentuk dari bekas kelompok gerilya yang mendapatkan pengakuan secara politik dalam Konstitusi 1991).

Bentuk Pemerintahan Kolombia adalah demokrasi dengan karakteristik: *tripartite separation of powers*, pemilihan umum, serta mengutamakan kebebasan pers dan personal. Namun, yang terjadi di dalam negaranya terlihat adanya paradoks dimana tingginya tingkat kekerasan yang terjadi, pelanggaran terhadap Hak asasi manusia serta meningkatnya *gap* antara

yang kaya dan yang miskin¹⁸. Perbedaan karakteristik dengan implementasi sering kali disebut dengan “Colombia Paradox”.

Dari paradoks yang ada, dapat dikatakan bahwa Kolombia sangat jauh dari upaya demokratisasi¹⁹.

“Democratization is the process whereby the rules and the procedures of citizenship are either applied to political institutions previously governed by other non-democratic principles, or expanded to include persons not previously enjoying such rights and obligations, or extended to cover issues and institutions not previously subjected to citizen participation.”

Pada awal abad 21, rezim politik di Kolombia masih mendapat pengaruh dari rezim *National Front* dalam menjalankan pemerintahan seperti adanya kekerasan dan tekanan.

Kolombia merupakan salah satu negara dengan tingkat kekerasan tertinggi di dunia, dengan rata-rata 30.000 pembunuhan setiap tahunnya dan 10% diantaranya terjadi karena adanya konflik bersenjata²⁰. Menurut data AS, rata-rata terjadi 77,5 pembunuhan per 100.000 orang, delapan kali lebih tinggi

¹⁸ J.B. Febres Cordero, “La Democracia en Colombia: Un Proyecto en Construcción, diakses dari <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part1.html>, pada tgl. 25 Maret 2010.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Diakses dari <http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/democrac/50.htm> pada tanggal 18 Agustus 2007, pukul 22.30 WIB.

daripada AS²¹. Kekerasan yang terjadi merupakan kombinasi dari beberapa faktor seperti *drugs trafficking*, korupsi, hutang yang terus menumpuk (terutama di empat kota besar, Santafe de Bogota, Medellin, Cali, dan Barranquilla), serta konflik bersenjata. Kekerasan yang terus meningkat sejak awal 1990-an, banyak dilakukan oleh kelompok gerilya, kelompok paramiliter dan *insurgent*.

Berbicara mengenai kekerasan yang terjadi di Kolombia tidak pernah bisa lepas dari masalah industri obat-obatan terlarang dan organisasi yang menjadi distributor obat-obatan terlarang tersebut serta kelompok-kelompok pemberontak. Industri obat-obatan terlarang di Kolombia dimulai dengan menanam mariyuana sejak tahun 1970an.

Ada dua kartel yang mendominasi industri obat-obatan terlarang di Kolombia yakni kartel Medellin dan Cali. Kedua kartel ini kemudian mendistribusikan dan menjual obat-obatan terlarang tersebut ke dalam wilayah Amerika Serikat.

Kedua kartel tersebut memberikan efek yang besar bagi pemerintahan Kolombia, terutama karena praktek terorisme, intimidasi dan korupsi yang mereka lakukan. Pada dasarnya, ada tiga hal dasar yang membedakan kedua kartel tersebut; dalam struktur organisasi mereka, keterlibatan dalam politik dan cara intimidasi, serta dalam upaya penggunaan kekerasan. Pertama, Kartel Medellin, memiliki struktur organisasi dimana Pablo Escobar sebagai pemimpinnya. Berbeda dengan Cali yang merupakan gabungan dari beberapa

²¹ *Ibid.*

organisasi kecil lain. Kedua, Medellin menggunakan uang serta menggunakan pengaruhnya untuk menyuap elit politik demi mendapatkan tempat di pemerintahan. Sedangkan Cali, tidak terlibat banyak dalam masalah politik kecuali ketika mereka merasa perlu untuk memproteksi kelanjutan usaha mereka. Misalnya seperti mencegah penangkapan atau upaya hukum yang ditujukan kepada mereka. Cali menggunakan uangnya untuk menyuap hakim dan jaksa atau pegawai pengadilan. Dari metode yang dilakukan, Medellin cenderung menggunakan kekerasan dan teror, sedangkan Cali menyampaikan *interest*-nya dengan menyuap, manipulasi dan intimidasi.

Perbedaan ketiga, Medellin menggunakan kekerasan sebagai *political tool* demi mencapai kepentingan institusi dan menjadi elit politik, dimana Cali tidak selalu menggunakan kekerasan. Yang menjadi target utama dari Medellin adalah pengadilan dan para elit politik. Selain itu, Medellin juga berupaya untuk menghancurkan gerakan revolusioner sayap kiri, terutama FARC²².

Selain keberadaan kartel-kartel, *insurgency* juga menjadi masalah yang cukup besar di Kolombia. *Insurgent* mulai banyak muncul pertengahan 1960-an, terutama pasca terbentuknya Kesepakatan 16-Tahun *National Front* antara Partai Liberal dan Konservatif. Kelompok-kelompok gerilya terbesar diantaranya adalah *The Colombian Security Forces*, dua kelompok sayap kiri—FARC (*Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia*) dan ELN

²² Livingstone, Grace. *Inside Colombia: Drugs, Democracy, and War*. New Brunswick: Rutgers University Press, 2004.

(*Ejército de Liberación Nacional*)—serta kelompok yang lebih kecil, *Ejército de Liberación Popular* (EPL), dan gerakan paramiliter *Autodefensas Unidas de Colombia* (AUC).

Colombian Security Forces merupakan gabungan dari angkatan bersenjata Kolombia (146.000 orang), angkatan udara (10.000 orang), angkatan laut (5.000 orang), serta pasukan Polisi Kolombia (120.000 orang). Kelompok militer ini pun seringkali terlibat dalam praktek korupsi dengan member sogokan berupa obat-obatan terlarang (*narco-corruption*).

FARC, sebagai salah satu kelompok terbesar, dibentuk Mei 1964 oleh seorang pemimpin gerilya Manuel Marulanda dengan total tentara sekitar 16.000 orang²³. Pada masa pemerintahan Guillermo Leon Valencia, diadakan Operasi Marquetalia untuk mnghilangkan kantong-kantong komunisme termasuk ke wilayah FARC. Setelah berusaha menghancurkan wilayah FARC, diterapkanlah Reformasi Agraria, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lainnya dari para pemilik tanah. Kelompok FARC kemudian memilih untuk bermigrasi ke daerah rural dan mengokupasi wilayah yang dihuni cukup banyak kaum migran. Kaum migran ini memilih menanam daun koka demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Okupasi terhadap wilayah yang cukup luas dan terus bergerak di industri obat-obatan terlarang, menambah pemasukan bagi FARC. Dari data yang diberikan pasukan militer Kolombia, 61 wilayah yang dikuasai oleh

²³ Diakses dari <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Colombia.pdf>, *Op. Cit*

FARC, 32 diantaranya memiliki hubungan dengan perdagangan obat-obatan terlarang.

Pada masa pemerintahan Andrés Pastrana Arango (1998-2002), Kolombia menghadapi makin banyak masalah seperti tingginya tingkat pengangguran, meluasnya wilayah yang dikuasai kelompok-kelompok gerilya, serta meluasnya produksi obat-obatan terlarang. Untuk itu, Pastrana memutuskan untuk melakukan perjanjian damai dengan kelompok gerilya, FARC. Sebagai upaya damai, FARC diberikan wilayah demiliterisasi (*Demilitarized zone—DMZ*) seluas 51.000 km². Namun, di wilayah itu ternyata FARC justru memperluas penanaman daun koka dan penjualan obat-obatan terlarang, mempersenjatai pasukan militernya serta melakukan penculikan untuk melakukan negosiasi. Perjanjian ini berakhir pada awal tahun 2002-an dan FARC serta ELN terus melakukan pemberontakan.

III.2 Hubungan Kolombia dengan Amerika Serikat

Hubungan Kolombia dengan AS dimulai sejak 19 Juni 1822, pada masa kemerdekaan Kolombia. AS menjadi salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Kolombia dan mengirimkan perwakilan AS di Kolombia sejak 1832.

Pasca Perang Dunia II, hubungan kedua negara semakin berkembang terutama dalam kerjasama ekonomi dan keamanan dalam konteks Perang Dingin dan anti Komunisme. Secara tidak langsung, Perang Dunia II juga

memberikan dampak positif bagi hubungan bilateral mereka, menstimulus perekonomian AS melalui ekspor dari Kolombia ke AS serta bantuan militer dari AS ke Kolombia.

Hubungan bilateral AS-Kolombia mulai memasuki fase yang lebih berat ketika masalah perdagangan obat-obatan terlarang mulai meningkat. Diawali pada tahun 1960-an ketika masalah obat-obatan terlarang ini mulai mendapat perhatian yang lebih dalam hubungan bilateral mereka.

Masalah obat-obatan terlarang ini “memaksa” AS untuk mulai menerapkan kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan obat-obatan terlarang.

“the U.S. war on drugs has taken on life of its own , an internal drive that will continue regardless of its success in actually reducing the amount of illegal drugs that enter the United States”²⁴

Kebijakan AS mengenai kontrol atas obat-obatan terlarang terus berkembang. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mencegah masuknya obat-obatan terlarang ke wilayah AS dan ditujukan pada negara-negara sumber obat-obatan tersebut, termasuk Kolombia.

²⁴ R. Crandall, *Driven by Drugs: U.S. Policy Toward Colombia*, (London: Lynne Rienner Pub., 2002)

III.2.1 Generasi Pertama Kebijakan Pengendalian Obat Amerika Serikat

Amerika Serikat secara tradisional menanggapi penyalahgunaan narkotik dan perdagangan obat-obatan terlarang dengan sebuah pendekatan hukum dan *unilateral*, baik di dalam negeri maupun internasional. Sejak awal 1900-an, pemerintah AS telah mengadopsi sebuah paradigma hukum terhadap semua pengguna obat dan para pedagang obat-obatan terlarang. Khususnya, pada tahun 1914, Pemerintah AS mengadopsi UU Harrison yang membentuk hukum dasar untuk pecandu²⁵.

Tidak sampai pada masa Presiden Nixon yang melakukan pemecahan masalah narkotik menjadi prioritas pada agenda politik Presiden. Nixon adalah orang pertama yang menyatakan perdagangan obat-obatan terlarang sebagai masalah keamanan nasional dan untuk memulai yang dapat dikenal sebagai “*first drug war*”.

War on drugs semakin memonopoli operasi birokrasi federal dan AS telah menyediakan dana yang semakin banyak telah dialokasikan. AS menganggap masalah narkotik sebagai ancaman untuk keamanan nasional, yang dengan demikian menjelaskan mengapa pemerintah AS telah merespon dengan pendekatan militer dan penegakan hukum.

War on drugs AS telah diuraikan berdasarkan premis berikut:

- Segala bentuk penyalahgunaan narkotik secara moral salah dan merupakan tindak pidana;

²⁵ E. C. Bertram, *Drug War Politics: The Price of Denial*, (Berkeley: University of California Press, 1996), hlm. 102.

- Tergantung kepada pemerintah AS untuk mengakhiri penyalahgunaan narkotik;
- Cara terbaik untuk memerangi penyalahgunaan narkotik dan perdagangan, adalah melalui pemaksaan dan hukuman dari pengguna narkotik dan pengedar.

Presiden Nixon mendorong undang-undang anti-narkotik yang baru, yaitu *Comprehensive Drug Abuse Prevention Act* pada 1970 dan 1972 *Drug Abuse and Treatment Act*. Nixon juga mendirikan jaringan fasilitas perawatan nasional, *Special Action Office* (untuk pengobatan ketergantungan narkotik), konsolidasi birokrasi anti-narkotik menjadi “narco-enforcement complex” dan menganjurkan Federal meningkatkan pendanaan.

Pengganti Nixon, Presiden Ford dan Carter, tidak terlalu berfokus pada *War on Drugs*, terutama karena kendala domestik. Namun demikian, selama tahun 1970-an, “perjuangan” terus tumbuh - walaupun secara bertahap - seperti dana yang lebih diarahkan ke penegakan hukum melawan obat-obatan terlarang. Pada tahun 1977, di bawah pemerintahan Ford, \$ 382 juta dialokasikan untuk pelaksanaan hukum narkotik. Selama empat tahun berikutnya, dana untuk pengawasan obat-obatan terlarang terus menambah. Di tahun 1981, anggaran penegakan hukum narkotik meningkat hingga \$ 707 juta, berdasarkan Strategi Nasional tahun 1984. Singkatnya, dalam hitungan empat tahun, 1977-1981, anggaran dialokasikan untuk penegakan hukum dan pengendalian obat-obatan secara keseluruhan meningkat hampir dua kali lipat.

III.2.2 Konsolidasi *War on Drugs* di bawah Pemerintahan Bush

War on Drugs, seperti dikenal pada tahun 2001, itu pada umumnya ditentukan oleh Presiden Bush, ketika September 1989, ia secara resmi menyatakan perang terhadap narkotik. Yang paling penting unsur strategi anti obat Bush dituangkan dalam Aksi Anti Penyalahgunaan Narkotik pada 1988 dan 1989 Strategi Pengendalian Obat (yang termasuk *Andean Initiative*). Tujuan utama dari Aksi Anti Penyalahgunaan Narkotik pada 1988 adalah untuk mengurangi pasokan kokain ke tujuan kedua Amerika Serikat sementara adalah untuk mengurangi pasokan heroin. Amandemen UU 1988 dengan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri 1961: ia menyerukan intensifikasi larangan dan pemberantasan narkotik yang memperluas peran militer. Departemen Pertahanan (DOD) menjadi organisasi yang memimpin untuk mendeteksi obat-obat terlarang dan melakukan pengawasan di udara dan rute perairan utama, yang digunakan oleh pengedar narkotik.

UU tahun 1988 juga berupaya untuk meningkatkan tindakan terhadap pencucian uang, yang mula-mula diselenggarakan dalam Undang-Undang Anti-Penyalahgunaan Narkotik 1986. Strategi Pengawasan Obat Nasional Presiden Bush adalah inti dari perang melawan obat dan menyediakan model yang tetap berlaku sampai dengan 2002. Strategi Pengendalian Obat Nasional (sejak 1989) terdiri dari empat instrumen utama. Yang pertama menjadi pemberantasan tanaman ilegal. Pemerintah AS sebagai negara produsen dengan bantuan teknis yang diperlukan, herbisida kimia, semprot dan peralatan pesawat lainnya, untuk tujuan pemberantasan tanaman

ilegal. Instrumen kedua terdiri dalam larangan obat-obat terlarang dan bahan kimia precursor, dengan membantu produsen dan transit negara yang menyita obat terlarang sebelum menyeberangi perbatasan Amerika Serikat dan memantau pengiriman melalui pengintaian udara dan perairan. Presiden Bush juga diandalkan, untuk sebagian kecil, pada kerjasama internasional, sebagai sarana untuk membantu negara-negara sumber mengurangi budidaya tanaman terlarang dan perdagangan narkotik dan untuk meningkatkan pembangunan alternatif bagi petani tanaman terlarang.

Ketiga, AS melakukan program bilateral melalui Badan USAID dan program kerjasama multilateral, seperti *United Nations Office of Drug Control and Crime Prevention* (UNODCCP), sebelumnya dikenal sebagai *United Nations Drug Control Program* (UNDCP, sampai Oktober 2002). Akhirnya, Strategi menyerukan sanksi (terutama ekonomi), sebagai bagian dari proses sertifikasi, terhadap orang-orang sumber dan/atau negara-negara transit yang tidak memenuhi persyaratan AS untuk memerangi *War on Drugs*. Jadi strategi menjunjung tinggi proses sertifikasi, seperti yang disyaratkan oleh Kongres. Singkatnya, Strategi Presiden Bush terfokus pada militerisasi perang narkotik untuk mengurangi pasokan obat-obatan terlarang. Namun, ia mengajukan proposal baru, seperti memberikan bantuan ekonomi untuk negara produsen kokain dan lebih memfokuskan pada pembongkaran organisasi perdagangan dan kurang pada mengganggu aktivitas petani tanaman terlarang. Presiden Bush juga memperkuat koordinasi antar lembaga dan departemen (Departemen Luar Negeri, Layanan Departemen Keuangan-Bea Cukai

Amerika Serikat, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman- Badan Penegakan Narkotik, Militer dan USAID), yaitu melalui pembentukan, pada tahun 1989, Presiden *Office of the National Drug Control Policy* (ONDCP). Seperti halnya pendekatan Presiden Reagan dan Clinton, Presiden Bush Strategi Pengawas Obat dikritik, oleh Amerika Serikat dan kritik Amerika Latin, karena terlalu "terfragmentasi dan terlalu bilateral secara natural"... yang cocok untuk memecahkan masalah multilateral". Seperti ditegaskan oleh Bruce Bagley, kebijakan pengendalian obat di bawah pemerintahan Reagan terlalu menekankan bantuan militer dan larangan bukannya mendorong jangka panjang, pembangunan ekonomi²⁶.

Perang AS terhadap obat-obatan mencapai puncaknya pada tahun 1989, mencapai tingkat tertinggi (di waktu itu) dari militerisasi dan bantuan ekonomi sebagai alat untuk menekan. *The Andean Initiative*, diumumkan pada bulan September 1989, adalah tulang punggung *War on Drugs* Presiden Bush, memungkinkan USG untuk memberikan bantuan militer dengan jumlah besar, didasarkan pada fakta militer dengan Kolombia, Peru dan Bolivia. Tujuan utama program ini adalah untuk mengurangi pasokan kokain ke Amerika Serikat sebanyak enam puluh persen pada tahun 1999, oleh sarana pemberantasan, larangan dan pembongkaran kartel tingkat tinggi. The Andes Initiative disediakan \$2,200,000,000 selama lima tahun (1989-1994) ke Kolombia, Peru dan Bolivia, terutama dalam bantuan militer dan pada tingkat bantuan ekonomi lebih rendah. Perlu dicatat bahwa bantuan AS diikat dengan

²⁶ *Ibid.*

kondisi bahwa ketiga negara Andean perjanjian tanda militer dengan USG untuk memungkinkan keterlibatan militer mereka dalam perang narkotik. Kolombia adalah orang pertama yang menandatangani perjanjian seperti itu, pada tahun 1989, diikuti oleh Bolivia, Mei 1990, dan Peru, Mei 1991. Inisiatif ini juga disertai oleh Perdagangan Andean Initiative (Paket I dan II)²⁷.

III.3.3 War on Drugs di bawah pemerintahan Clinton

Hal ini merupakan *Drug War Policy* di bawah Presiden Clinton dengan berfokus pada strategis pergeseran yang terjadi pada 1994-1995. Dapat dijelaskan, kebijakan *counternarcotics* Clinton mengalami dua tahap: Tahap 1, 1992-1994, difokuskan pada obat domestik pengobatan dan program pencegahan (bagian dari penurunan permintaan pendekatan); Tahap 2, dari 1994 hingga 2000, berpusat pada pengurangan pasokan dan penegakan hukum tentang narkotik. Meskipun niat awalnya dengan reformasi kebijakan obat ini diwariskan dari Presiden Bush, dengan mengubah keseimbangan yang tidak setara antara pendekatan-penawaran dan sisi permintaan, Presiden Clinton kembali ke kebijakan pengontrolan obat, didasarkan pada pasokan pengurangan dan penegakan hukum. Potensi penjelasan untuk perubahan ini secara singkat diperiksa, sebagai mereka dapat menyediakan basis analisis untuk mempelajari proses kebijakan dari *Plan Colombia*. Memang tampak bahwa pergeseran Clinton sebagian didorong oleh kekuatan yang sama, yang

²⁷ Alexandra Guágeta, *Change and Continuity in U.S.-Colombian Relations and the War Against Drug*, *Journal of Drug Issues*, Winter 2005

berasal dari politik domestik dan takut untuk tampil menjadi kebijakan yang lebih lembut, yang memainkan peranan selama proses *Plan Colombia*²⁸.

Pada awal pemerintahannya, Presiden Clinton menyatakan keinginan untuk melakukan reformasi UU anti narkotik, dengan fokus pada kebijakan dan mengalokasikan dana tambahan untuk terapi obat domestik dan pendidikan / program pencegahan. Pada tahun 1993, Clinton melakukan evaluasi administrasi menyeluruh mengenai kebijakan masa lalu tentang kontrol obat di AS, yang sampai pada kesimpulan bahwa *Andean Initiative* telah gagal sepenuhnya untuk mengurangi pasokan narkotik di Amerika Serikat.

Selama Tahap 1 dari kebijakan pengendalian obat-obatan terlarang Clinton, dari 1992 hingga 1994, Clinton mendukung strategi obat, didasarkan pada pendekatan kesehatan masyarakat, dengan penekanan pada program perawatan bagi para pengguna.

²⁸ *Colombia: Washington's Next Dirty War*, Global Exchange Newsletter, Summer 2000

BAB IV

PLAN COLOMBIA

Intervensi AS ke Kolombia bukan merupakan fenomena baru. Salah satunya diawali dengan pengambilalihan Panama dari Kolombia pada tahun 1903. Pada kenyataannya, intervensi AS ke Kolombia sudah menjadi “kesatuan” dalam sejarah politik Kolombia selama lebih dari seratus tahun²⁹.

Pada masa pasca Perang Dunia II, Kolombia merupakan salah satu negara yang menjadi kamp anti-komunis untuk wilayah Amerika Latin. Masalah politik yang muncul menjadi pengaruh yang cukup besar terhadap hubungan AS dengan Kolombia karena akan selalu dikonfrontasi dengan segala bentuk kekerasan oleh pemerintah Kolombia yang didukung oleh AS. Contohnya adalah masalah gerakan yang dipimpin oleh Jorge Eliecer Gaitan. Ketika keterlibatan AS semakin besar, keadaan politik Kolombia justru mengalami perubahan besar-besaran.

Perubahan paling besar terlihat dari masalah kesejahteraan penduduk. Di satu sisi, penduduk yang tinggal di kawasan *traditional rural* semakin buruk keadaannya. Sedangkan yang kaya dan para elit yang punya hubungan langsung dengan AS justru hidup semakin mewah. Hal ini juga menjadi alasan semakin meruncingnya *class conflict* di wilayah Kolombia.

²⁹ Andy McNerney, “The Origin and Evolution of Colombia”, dalam *War in Colombia: Made in USA*, (New York: International Action Center, 2003)

Plan Colombia merupakan satu program yang diajukan oleh Presiden Andrés Pastrana Arango sebagai upaya untuk meminta bantuan dari AS, pada masa pemerintahan Clinton, dalam menyelesaikan masalah konflik dalam negerinya pada tahun 2000³⁰. Program ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan pemerintahan Kolombia dan para elit politiknya terhadap pemerintah AS. Bagi pemerintah Kolombia, ketergantungan terhadap AS bukan hanya sekedar untuk meningkatkan efisiensi di wilayah Kolombia, tetapi juga *Plan Colombia* dirancang untuk mampu mengurangi gerakan-gerakan yang mengancam, meningkatkan kesejahteraan serta menghindari eksploitasi.

IV.1 *Andean Initiative*

Sebelum membahas mengenai *Plan Colombia*, perlu dibahas pula *Andean Regional Initiative* pada masa pemerintahan Bush, pada awal-awal 1990an. Diawali dengan kejatuhan kelompok sosialis Eropa bagian timur. AS semakin gencar mengintervensi wilayah-wilayah yang berseberangan dengan orientasi politiknya.

Efek yang cukup besar terasa di wilayah Amerika Latin. Pada Desember 1989, AS mulai menginvasi Panama. Dilanjutkan pada Februari 1990, Sandinistas, Nikaragua, turun kehilangan *power*-nya karena *civil war* yang terjadi yang dibiayai oleh AS. Selain itu intervensi AS sebagai mediator,

³⁰ *Ibid.*

juga terlihat di El Salvador yang mengalami *civil war* yang masih terus berlangsung sampai akhirnya FMLN akhirnya menyetujui untuk melakukan gencatan senjata.

Kejatuhan kaum sosialis juga menjadi “tanda” awal dari diberhentikannya dana bantuan militer AS untuk wilayah Amerika Latin. Namun ternyata, ini juga menjadi awal dikeluarkan lagi dana bantuan militer AS untuk wilayah Bolivia, Kolombia dan Peru. Dana bantuan ini dikeluarkan melalui program *Andean Initiative* oleh Presiden George Bush berupa bantuan ekonomi dan militer sebesar 2.2 miliar dolar³¹. Target utama dari program ini sebenarnya adalah *insurgent* di Peru yang dipimpin oleh Partai Komunis Peru (PCP).

IV.2 Latar belakang *Plan Colombia*

Ada dua *events* yang melatarbelakangi peningkatan dana bantuan militer serta intervensi AS secara dramatis. Pertama adalah implementasi *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) pada tahun 1994. Dari NAFTA, pemerintah AS mengumumkan secara tidak langsung, bahwa tujuan utama kebijakan ini terhadap negara-negara *Western Hemisphere* adalah sebagai wilayah yang luas dengan tenaga kerja murah yang nantinya akan berguna bagi perusahaan-perusahaan AS serta menjadi konsumen bagi produk-produk AS. Bagi Presiden Bill Clinton sendiri, tujuan dari NAFTA disebutkan

³¹ *Colombia: Washington's Next Dirty War*, Global Exchange Newsletter, Summer 2000

“reach out to the other market-oriented democracies of Latin America to ask them to join this great American pact.”³²

Pembukaan NAFTA membawa efek lain selain implementasi kebijakan luar negeri AS di Amerika Latin. Pada Januari 1994, *Zapatista National Liberation Army* (EZLN) menduduki daerah Chiapas, di selatan Meksiko. Zapatista berusaha menunjukkan kepada AS bahwa segala rencana dan kebijakannya di wilayah Amerika Latin tidak dapat dengan mudah dilaksanakan.

Event kedua yang penting adalah perubahan besar-besaran yang terjadi di dalam negeri Kolombia itu sendiri, terutama pada tahun 1996. Sebelum tahun 1996, karakteristik dari kehidupan politik Kolombia adalah terbentuknya kelompok paramiliter, teror yang mengancam serta kekerasan yang sering terjadi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok gerilya dan *insurgent*.

Selain itu, muncul pula gerakan-gerakan progresif yang kemudian terbentuk dalam *Patriotic Union* (UP), sebuah gerakan politik yang terbentuk pada tahun 1985. Gerakan ini terbentuk untuk menjadi mediator antara FARC dengan pemerintah Kolombia. Namun, upaya damai ini hanya bertahan hingga akhir 1987. Pasca kegagalan upaya damai tersebut, aktivis UP justru menjadi target teror kelompok paramiliter. Lebih dari 4000 aktivis tewas dan ini menjadikan gerakan progresif di wilayah Kolombia justru semakin melemah³³.

³² *Ibid.*

³³ Andy McNerney, "The Origin and Evolution of Colombia", *Op. Cit.*

Dua kejadian tersebut mendorong FARC menurunkan militernya untuk mencegah campur tangan negara lain di dalam wilayah Kolombia dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh kelompok paramiliter.

Kejadian-kejadian tersebut juga mendorong gerakan demonstrasi massa Kolombia di jalan di kota-kota. Awal September 1996, puluhan ribu kelompok petani memblokir jalan utama Kolombia. Ini sebagai suatu bentuk protes terhadap kebijakan defoliasi atau menghancurkan tanaman dengan bahan kimia yang dikeluarkan oleh Presiden Ernesto Samper. Kebijakan Samper ini juga sebagai upaya anti narkotika yang dijalankan oleh pemerintah Kolombia dan mendapat dukungan dan bantuan dari AS. Penghancuran dengan bahan kimia ini merusak tanah sehingga para petani kehilangan sumber mata pencahariannya karena kebijakan tersebut.

Selain itu, banyak kelompok lain, terutama yang bekerja di sektor sosial, yang juga melakukan demonstrasi besar-besaran. Hal ini disebabkan peningkatan harga-harga barang sejak terbentuknya NAFTA. Salah satu bentuk demonstrasinya adalah dengan membentuk barikade di jalan utama di Facatativa, dekat Bogota, pada 17-18 September 1996³⁴.

Plan Colombia, dari sisi AS sendiri, merupakan program yang setuju untuk dijalankan karena adanya asumsi yang salah yang ditekankan oleh AS³⁵. Pertama adalah analogi yang salah, dalam konteks sejarah, karena AS

³⁴ *Ibid.*

³⁵ James Petras, "Geopolitics of Plan Colombia" dalam *War in Colombia: Made in USA*, *Op.Cit* hlm. 185

menganggap berhasil menanggulangi konflik di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Latin.

Berkembangnya konflik di kawasan Amerika Tengah yang mendorong intervensi AS di Amerika Tengah. AS merasa berhasil menciptakan perdamaian dengan menggunakan instrumen militer dalam skala besar dan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Selain itu, AS dapat mengajak pemimpin kelompok gerilya di Amerika Tengah dengan menawarkan *political settlement* dan ikut dalam pemilihan umum³⁶.

Plan Colombia merupakan bentuk baru namun juga merupakan lanjutan dari keterlibatan AS di wilayah Amerika Latin pada masa Presiden Kennedy. Diawali pada sekitar tahun 1960an, AS di bawah pemerintahan Kennedy, meluncurkan program *counterinsurgency*. Program ini dilakukan dengan membentuk pasukan militer khusus dan dirancang untuk menyerang *internal enemies*. Target dari program ini adalah *Colombian Self-defense communities*, terutama di wilayah bagian Marquetalia. Dan Pentagon pun terus mengirim pasukan *counterinsurgency* secara berkala ke Kolombia.

Pada masa pemerintahan Clinton, program *counterinsurgency* yang dilakukan oleh Kennedy, tetap dijalankan dan dikembangkan. Perbedaan antara program Kennedy dengan Clinton adalah bahwa pada masa Kennedy program ini dijalankan sebagai suatu bentuk *containment policy* atas komunisme internasional. Sedangkan pada masa Clinton, justifikasi program ini adalah berdasar pada ancaman narkoba.

³⁶ James Petras, *Ibid.*

Selain itu, perbedaan antara *Plan Colombia* Clinton dengan program *counterinsurgency* Kennedy dapat dilihat dari skala dan lingkup intervensi. *Plan Colombia* merupakan program jangka panjang yang mengeluarkan miliaran dolar serta menggunakan persenjataan modern dalam skala yang besar. Pada masa Kennedy, program *counterinsurgency* jauh lebih kecil skalanya. Rendahnya penggunaan persenjataan serta kecilnya skala operasi militer pada masa Kennedy disebabkan karena pada masa itu kelompok gerilya merupakan kelompok-kelompok yang terisolasi. Berbeda pada masa sekarang yang gerakan kelompok-kelompok itu lebih bisa mencapai skala nasional.

Asumsi kedua yang ditekankan oleh AS dalam menerapkan *Plan Colombia* adalah anggapan yang salah mengenai kelompok-kelompok gerilya di Kolombia dan sumber kekuatannya. Dan terakhir adalah fokus berlebihan pada *political power* kelompok gerilya yang berbasis pada narkoba.

Kekuatan FARC-EP dan ELN di Kolombia sendiri tidak dapat disamakan dengan kekuatan kelompok *insurgent* di wilayah Amerika Tengah yang menjadi target program *counterinsurgency* Kennedy. FARC merupakan kelompok yang terbentuk sudah cukup lama sehingga lebih “berpengalaman”. Kelompok-kelompok gerilya di Kolombia juga dianggap sebagai penghambat terjadinya segala proses damai dan menjadi oposisi dalam struktur pemerintahan Kolombia.

IV.3 Implementasi *Plan Colombia*

Melihat keadaan *insurgent* di Kolombia, penasehat Presiden Samper, menyebutkan bahwa hanya ada satu cara yang dapat mengatasi masalah tersebut, yakni dengan mengadakan dialog dengan kelompok *insurgent* tersebut.

Baru pada tahun 1998, muncul persetujuan dalam pemerintah Kolombia bahwa militer Kolombia tidak mampu menghadapi kelompok *insurgent* tersebut. Presiden baru pada masa itu, Andrés Pastrana Arango, akhirnya melakukan dialog dengan kelompok FARC. Di belakang alasan *war on drug* seperti pada program *Andean Initiative*, *Plan Colombia* dibentuk. Program ini dirancang agar bisa menghapuskan kekuatan kelompok gerilya, menahan pertumbuhan kelompok-kelompok oposisi terhadap pemerintahan dengan kebijakan ekonomi yang pro-*International Monetary Fund*.

Andrés Pastrana pertama kali mengajukan *Plan Colombia* ke Kongres pada tahun 2000. Namun, konsep awal program ini dimulai pada tahun 1998³⁷. Program ini diumumkan di AS dan dibahas dalam Kongres AS baru pada September 1999³⁸.

Plan Colombia dijelaskan oleh Andrés Pastrana sebagai program “Marshall Plan” di Kolombia. Program ini bertujuan untuk membangun Kolombia menjadi lebih baik. Gambaran keadaan Kolombia pada masa ini adalah negara dengan tingkat penjualan narkoba yang sangat tinggi,

³⁷ Equino Nizkor, “Plan Colombia: A Strategy without a Solution”, February 2000.

³⁸ *Ibid.*

intensitas konflik bersenjata di dalam negeri yang cukup tinggi, kurangnya kesempatan untuk melakukan perubahan terutama bagi kaum muda, serta pembagian lahan yang kurang adil terutama bagi kelompok petani.

Selain itu, program ini juga ditujukan untuk membantu memperbaiki pemerintahan dan meningkatkan legitimasi institusional baik lokal maupun nasional. Isu penting seperti pelanggaran *human rights* dan rendahnya tingkat partisipasi rakyat dalam kehidupan berdemokrasi juga menjadi hal yang fundamental dalam pembentukan program ini³⁹.

Melalui program ini, Kolombia akan mendapatkan suntikan dana sebesar 7.5 miliar dolar, dimana 4 miliar dolar dihasilkan dari Kolombia itu sendiri serta 3.5 miliar dolar didapat dari *international community*. Selain itu, pemerintahan Kolombia juga mendapat bantuan dari AS sebesar 1.3 miliar dolar selama tiga tahun. Terdapat lima elemen penting dalam program ini: *the peace process, the economy, counter-drug strategy, reform of the judicial system, dan social development*⁴⁰.

Plan Colombia Clinton-Pastrana merupakan suatu program yang disetujui oleh Kongres AS dengan pembatasan bahwa dana bantuan yang diberikan hanya untuk mendukung upaya anti narkotika.

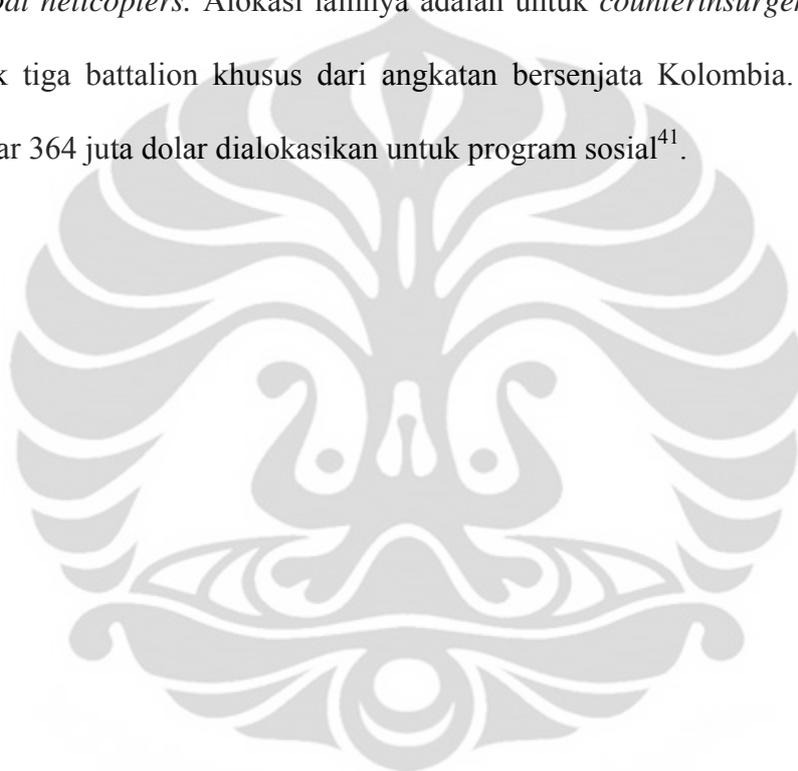
Pada perjalanannya, *Plan Colombia* bisa disebut juga sebagai bantuan AS. Hal ini disebabkan dalam implementasi, Kolombia tidak pernah mengalokasikan pemasukannya sebesar 4 miliar dolar seperti pada rencana

³⁹ Mario A. Murillo, *Colombia and the United States: War, Unrest and Destabilization*, (Kanada: Hushion House, 2004), hlm. 127

⁴⁰ Andy McNerney, "The Origin and Evolution of Colombia", *Op. Cit*

awal pembentukan program tersebut. Selain itu, krisis ekonomi global yang terjadi juga menjadi penghambat bantuan dana dari negara-negara internasional lainnya, termasuk negara-negara Eropa. Sehingga, yang dana yang masuk untuk Kolombia hanya dari AS, sebesar 2 miliar dolar.

Dari bantuan tersebut, 80% dialokasikan untuk bantuan militer. Bantuan tersebut ditunjukkan dengan 18 *Blackhawk helicopters* dan 42 *Huey combat helicopters*. Alokasi lainnya adalah untuk *counterinsurgency training* untuk tiga battalion khusus dari angkatan bersenjata Kolombia. Dan hanya sekitar 364 juta dolar dialokasikan untuk program sosial⁴¹.



⁴¹ “U.S Aid Can’t Fix Drug War Setbacks”, *Houston Chronicle*, 29 September 2002.

BAB V

UJI HIPOTESA

Untuk analisa, dapat dilakukan dengan melihat kebijakan luar negeri AS masa Clinton dan dengan memberikan indikator untuk mempermudah menjawab pertanyaan permasalahan yang diangkat. **Indikator-indikator** yang digunakan adalah dengan melihat kepada variabel-variabel yang diambil dari konsep yang masing-masing saling berkaitan.

Pertama adalah dengan melihat tujuan nasional AS. Ada tiga tujuan nasional AS. Tujuan nasional AS pertama adalah masalah keamanan nasional. Dalam hal ini, keamanan nasional merupakan hal paling krusial yang dihadapi oleh AS. Masalah perdagangan obat-batan terlarang menjadi masalah besar karena dianggap akan menimbulkan ancaman bagi keamanan dalam negerinya. Ancaman tersebut bukan sekedar ancaman seperti masalah pertikaian, tapi juga masalah *human security* karena sebagian besar korbannya adalah individu usia produktif.

Untuk itu, AS merasa perlu melakukan pemberantasan langsung ke negara pemasok—dalam hal ini adalah Kolombia sebagai pemasok narkoba terbesar ke AS. Untuk mencapai tujuan nasional, AS terlibat langsung ke dalam negeri Kolombia dengan menggunakan instrumen berupa militer, contohnya penempatan kekuatan militer melalui *US Special Operation Forces* untuk membentuk *counternarcotic battalion* di Kolombia

Tujuan nasional AS selanjutnya adalah *promoting democracy*. Masalah penyebaran demokrasi di dunia memang menjadi perhatian yang terpenting dalam kebijakan luar negeri AS. Disebutkan oleh Clinton bahwa “*democracies don’t wage war on each other*”. Namun demikian, AS, Clinton khususnya, tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi tersebut, seperti apakah negara yang menjadi tujuan kebijakan tersebut mampu mempertahankan demokrasi yang dibentuk karena tidak semua negara memiliki kemampuan dan kepentingan yang sama dengan AS.

Ketiga adalah *promoting prosperity*. Masalah peningkatan kesejahteraan ini erat kaitannya dengan demokrasi yang disebarkan oleh Clinton, yakni dengan menjadi negara demokratis, maka perekonomian akan meningkat karena diterapkannya *market-based democracy*. Dalam hubungannya dengan penerapan *drug war policy*, yang pertama menjadi fokus AS adalah untuk mencapai bentuk negara yang demokratis harus dimulai dengan meningkatkan keamanan dalam negeri.

Dalam pencapaian tujuan nasionalnya tersebut, AS menggunakan instrumen tertentu yang juga digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai yang dianut oleh AS. Instrumen yang digunakan oleh AS adalah dalam bentuk bantuan yang bernilai sangat besar serta dengan menempatkan militernya di Kolombia. Sedangkan nilai-nilai yang diupayakan disebarkan adalah nilai-nilai demokrasi. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan penerapan kebijakan luar negeri AS masa pemerintahan Clinton.

Penggunaan indikator tersebut—secara sekilas—mampu memperlihatkan adanya maksud lain dari AS dalam menerapkan kebijakan tersebut ke Kolombia. Misalnya saja dengan jumlah bantuan yang diberikan AS kepada Kolombia yang mencapai \$1.3 miliar. Pada masa Perang Dingin, Amerika Latin memang merupakan bagian dari *containment policy* AS terhadap komunisme. Sedangkan, bantuan ini dikeluarkan pasca Perang Dingin, di mana AS telah menjadi satu-satunya negara *superpower*, sehingga, tidak diperlukan lagi politik pembendungan tersebut di wilayah Amerika Latin. Selain itu, bantuan miliaran dolar tidak akan mampu mengurangi atau bahkan menghentikan penjualan narkotika selama permintaan narkotika itu sendiri masih tinggi dari AS. Selain itu, dalam pemberantasan penjualan narkotika, AS—selain langsung “menghancurkan” pusat pemasoknya—seharusnya juga melakukan pemberantasan penjualan narkotika di dalam negerinya. Hal ini yang tidak banyak terdengar dilakukan oleh pemerintah AS. Ini berkaitan dengan tujuan kebijakan yang ketiga, yaitu peningkatan keamanan dengan elemen *neo-containment*.

Dalam lampiran bantuan AS yang ditunjukkan dalam Tabel Lampiran 1⁴², alokasi dana bantuan AS ke Kolombia. Dari data dari *International Narcotics Control* (INC), pendanaan dipisahkan sebagai Bantuan Sosial-Ekonomi dan Bantuan Militer.

⁴² Diakses dari <http://ciponline.org/facts/inlco.htm>, pada tanggal 4 Juni 2010. Data diambil dari *International Narcotics Control: Colombia*. Dari data tersebut dapat dilihat alokasi dana yang dikeluarkan oleh AS untuk membantu memberantas perdagangan narkotika di wilayah Kolombia.

Dalam alokasi Dana Bantuan Militer dan Kepolisian kemudian dikelompokkan lagi. Pertama, dana bantuan untuk Polisi Nasional Kolombia. Kedua, *Armed Forces Counternarcotics Support, Promote the Rule of Law, Infrastructure Support*, serta *Pipeline Security*. Di dalamnya ada *aviation support, support for eradication, support for interdiction*, bantuan administrasi, komoditas, serta pelatihan.

Bantuan dana komoditas diberikan dalam bentuk peralatan untuk perbaikan pesawat, peralatan penerbangan seperti radar, radio serta peralatan untuk investigasi. Dana bantuan untuk komoditas ini merupakan salah satu pengalokasian dana yang terbesar. Ditunjukkan dalam tabel lampiran, pada tahun 1996, AS mengeluarkan dana 7,4 juta dolar. Dana ini terus meningkat dua kali lipat pada tahun berikutnya, menjadi hampir 15 juta dolar. Namun, pada tahun 1998 turun menjadi hanya 8,9 juta dolar. Dan kembali meningkat pada tahun 1999 menjadi 12,4 juta dolar. Bahkan di akhir tahun 2000, meningkat menjadi lebih dari 20 juta dolar.

Ketika terjadi penurunan dana komoditas pada tahun 1998, justru terjadi peningkatan pendanaan yang dialokasikan untuk menambah personel militer, pembentukan basis pertahanan baru serta pengiriman tenaga ahli dari AS sebagai pelatih bagi Kepolisian Nasional Kolombia.

Pada tahun 1996 hingga tahun 2000, dana bantuan militer AS ke Kolombia menjadi yang paling besar. Dana bantuan militer bahkan mencapai lebih dari 85% dari total dana bantuan yang ada; sisanya adalah dana bantuan sosial. Jika dilihat dari alokasi dana, menunjukkan bahwa AS lebih *concern*

untuk menambah perlengkapan militer, mengadakan pelatihan terhadap militer Kolombia, hingga mengirimkan tim khusus untuk dapat memperkuat militer Kolombia.

Besarnya aliran bantuan militer tersebut tampak bertolak belakang dengan tujuan awal *Plan Colombia* saat disetujui oleh Kongres AS. Kongres AS menyetujui program tersebut dengan memberikan batas bahwa dana bantuan tersebut digunakan bukan untuk mempersenjatai militer, dan hanya sebatas bantuan dalam upaya anti narkotika.

Bantuan dana juga dialokasikan untuk sektor sosial ekonomi. Untuk dana bantuan *Drug Policy*, dikategorikan sebagai dana bantuan Sosial-Ekonomi. Pada tahun 1996, dana Bantuan sosial ekonomi yang dikeluarkan hanya \$500 ribu atau sekitar 3.1% dari total keseluruhan pengeluaran dana bantuan untuk tahun itu. Untuk alokasi *drug policy and awareness* paling besar dikeluarkan pada tahun 2000, sekitar 2 juta dolar. Total bantuan sosial ekonomi yang dikeluarkan pada tahun itu mencapai 225 juta dolar, atau hanya sekitar 25% dari total dana bantuan yang diberikan AS tahun 2000. Sedangkan pada tahun ini, total bantuan militer termasuk yang terbesar, sekitar 666 juta dolar.

Pada tahun 1997-1998, bantuan Sosial Ekonomi bahkan tidak mencapai 1%. Hampir seluruh dana dialokasikan untuk bantuan militer, terutama untuk melakukan pelatihan terhadap polisi nasional Kolombia, pengoperasian pesawat, serta pembentukan basis personel AS di Kolombia. Dana bantuan Sosial Ekonomi yang paling besar dikeluarkan oleh AS adalah

pada tahun 2002, dimana besarnya pun hanya 30% dari total seluruh bantuan yang dikeluarkan.

Selain itu, *concern* AS terhadap masalah demokrasi juga dapat dijadikan indikator karena Kolombia dianggap sebagai negara penganut “oldest democracy”⁴³. Karena itulah AS berupaya menyebarkan nilai-nilai demokrasi tersebut ke Kolombia. AS memiliki anggapan bahwa semakin tinggi tingkat demokrasi suatu negara, maka kemungkinan untuk timbulnya konflik akan semakin kecil.

Namun, upaya tersebut dihalangi oleh kelompok revolusioner sayap kiri, FARC. Dari sinilah kemudian terlihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh AS adalah untuk melawan kelompok FARC.

Bantuan untuk memperkuat sektor militer Kolombia serta pengadaan alat militer, seperti pesawat, radar, pelatihan bagi polisi, digunakan untuk menghancurkan FARC. Hal ini ditunjukkan dengan upaya pelatihan dan mempersenjatai militer Kolombia dan membentuk *counternarcotics battalions*. Militer ini kemudian melakukan penyerangan dan eradikasi di wilayah selatan Kolombia, yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh FARC⁴⁴. Militer Kolombia hanya berfokus pada wilayah ini, sedangkan di wilayah lain seperti di wilayah utara Kolombia, industri narkotika tetap

⁴³ Drug Policy Alliance, *The Drug War Across Borders: US Drug Policy and Latin America*, diakses dari <http://www.drugpolicy.org/>, pada tanggal 18 Agustus 2007, pukul 22.30 WIB.

⁴⁴ Diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/colombia.htm>, pada tanggal 20 Desember 2009 pukul 22.30 WIB

berjalan seperti biasa. Untuk menekan wilayah FARC, AS mengeluarkan dana \$ 600 juta untuk tahun 2000-2001.

Satu hal yang dilupakan oleh AS yang menunjukkan adanya maksud lain dari penerapan *drug war policy*, bahwa dalam upaya mengurangi produksi narkotika ada yang disebut dengan efek balon. Ketika AS hanya berfokus pada pencegahan di wilayah selatan Kolombia, wilayah lain di Kolombia justru akan meningkatkan produksi narkotikanya⁴⁵.



⁴⁵ Drug Policy Alliance, *The Drug War Across Borders: US Drug Policy and Latin America*, diakses dari <http://www.drugpolicy.org/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2009, pukul 19.00 WIB.